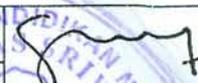


0	8	0	2	0	6	0	1	0	8	0	2	0	1	6	5	
Kode Fakultas	Kode PS/Bagian	Kode Publikasi	Kode Penulis	Tahun Publikasi	Kode Sumber Tulisan	Nomor urut Publikasi dan Fakultas										

## DINAMIKA PARTAI POLITIK DI SUMATERA SELATAN

Alfitri

Dosen FISIP dan Pascasarjana Universitas Sriwijaya (UNSRI), Palembang

### ABSTRAK

*Pertarungan partai politik dalam ranah politik nasional maupun lokal sangat dinamis, karena secara fungsional kehadiran parpol dalam sebuah sistem politik tidak saja sebagai barometer keberhasilan, tetapi juga harus dilihat secara lebih substantif apakah Parpol sudah menjalankan fungsi secara baik dan benar. Di Sumsel Parpol besar dan kecil berebut pengaruh dalam upaya memenangkan pertarungan Pilkada di setiap kabupaten/kota maupun provinsi. Hal ini terlihat dari persaingan dua partai besar, Golkar dan PDIP yang bertarung ketat memperbutkan kursi kekuasaan pemerintah di tingkat lokal sebagai bentuk dinamika partai politik di daerah. Dalam pemilu legislatif faktor figur calon legislatif akan mempengaruhi kemenangan Parpol, karena calon wakil rakyat akan bekerja mempengaruhi kinerja Parpol dalam memperebutkan kursi di parlemen lokal.*

*Kata kunci: Dinamika, Partai Politik, Pilkada*

### PENDAHULUAN

Pasca orde baru telah terjadi perubahan politik yang cukup mendasar dari sistem politik yang bercorak otoriter ke sistem politik demokrasi. Perubahan ini tidak lepas dari tuntutan rakyat yang menghendaki penentuan kekuasaan ada ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh rakyat. Jika pada masa orde baru, hanya terdapat tiga peserta pemilihan umum (Pemilu), dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu Golongan Karya, pasca orde baru muncul banyak partai (multi partai) yang menghiasi kompetisi memperebutkan suara rakyat dalam Pemilu. Partai yang ikut Pemilu, mulai tahun 1999 sebanyak 48 partai politik, kemudian berkurang menjadi 34 partai politik pada tahun 2004, dan bertambah lagi menjadi 44 partai politik yang akan bertarung pada Pemilu 2009. Jika dilihat dari partai politik peserta Pemilu telah terjadi dinamika politik yang cukup tinggi

dalam memperebutkan pengaruh politik yang ditandai dengan fluktuasi suara pemenang Pemilu. Tahun 1999 PDIP berhasil memenangkan pertarungan dengan menempatkan pada posisi pertama yang kemudian diikuti oleh partai Golkar. Namun pada Pemilu 2004 terjadi pembalikan, di mana partai Golkar berhasil memenangkan pertarungan diikuti oleh PDIP di posisi kedua. Hal ini menarik untuk dikaji, karena kemenangan partai politik secara nasional ini tidak terlepas dari dinamika politik lokal di hampir semua daerah provinsi, termasuk di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Pertarungan partai politik dalam ranah politik nasional maupun lokal sangat dinamis, karena ditentukan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu secara fungsional harus dipahami bahwa kehadiran parpol dalam sebuah sistem politik tidak saja sebagai barometer keberhasilan, tetapi juga harus dilihat secara lebih substantif apakah parpol sudah

menjalankan fungsi secara baik dan benar. Inilah yang merupakan akar keberhasilan demokrasi di suatu negara.

### **FUNGSI PARTAI POLITIK**

Partai tidak mungkin mengurus seluruh aspirasi dan kepentingan segenap masyarakat, oleh karena itu partai politik lebih mewakili, mempresentasikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan sebagai masyarakatnya saja. Memang ada partai yang mencoba untuk mengagregasikan seluruh kepentingan masyarakat, tetapi partai tersebut akan memiliki prioritas atau fokus perjuangan. Secara teoritis fungsi partai politik meliputi 4 (empat) fungsi pokok yaitu: pertama sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan dengan upaya untuk mengajak dan mencari orang-orang berbakat agar aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Partai turut memperluas terjadinya partisipasi politik. Penarikan kader termasuk salah satu bentuk rekrutmen yang dilakukan (Alfitri & Yenrizal, 2002). Dalam rekrutmen politik mestinya dilakukan secara terencana, dengan tim rekrutmen yang kompeten dan dana yang telah disiapkan dengan matang serta target rekrutmen yang jelas, sehingga mereka yang direkrut sesuai dengan kebutuhan partai.

Kedua, sebagai sarana pengatur dan pengelola konflik. Fungsinya mengarah pada pengaturan masyarakat pendukung agar tidak menjadikan perbedaan sebagai bentuk persaingan yang mengarah pada pertentangan. Partai politik berkewajiban melakukan usaha yang meredam dan memperkecil terjadinya konflik. Ketika masing-masing kandidat diusung partai saling merebut pengaruh pemilih, sebagai

salah satu lembaga demokrasi, partai politik berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan itu ke dalam lembaga legislatif untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

Ketiga, sebagai sarana Sosialisasi politik. Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Melalui sosialisasi politik juga mencakup proses pencapaian norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan menggunakan metode pelatihan kader, penataran, dan kursus-kursus, baik yang diselenggarakan partai maupun lembaga lain.

Keempat, sebagai sarana komunikasi politik. Fungsi ini menyangkut penyaluran berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga keseimbangan pendapat dalam masyarakat berkurang. Sesuai dengan sifat masyarakat yang heterogen dan variatif, maka pendapat dan aspirasi yang bermunculan juga bervariasi. Variasi pendapat tersebut kemudian ditampung dan dikumpulkan, selanjutnya diolah sehingga menjadi usulan yang akan disampaikan ke pemerintah. Berdasarkan usulan itulah nanti akan menjadi program dari partai politik untuk memperjuangkannya. Partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan pemerintah, sehingga terjadi arus informasi dari

masyarakat ke pemerintah, begitu pula sebaliknya.

Selain keempat fungsi di atas, partai politik juga membentuk pemerintahan, baik dalam Pilpres maupun Pilkada, karena tugas partai politik mengusung calon yang akan dipilih oleh rakyat dalam sebuah mekanisme pemilihan yang telah diatur dalam Undang-undang. Di sini partai politik mempunyai kesempatan besar untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa hanya dengan partainya lah keadilan dapat ditegakkan, rasa aman bisa didapat, dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Kegagalan pemerintah berarti kegagalan partai politik pula. Di Sumsel parpol besar dan kecil berebut pengaruh dalam upaya memenangkan pertarungan pilkada di setiap kabupaten kota maupun provinsi. Hal ini terlihat dari persaingan dua partai besar, Golkar dan PDIP yang bertarung ketat memperbutkan kursi kekuasaan pemerintah di tingkat lokal sebagai bentuk dinamika partai politik di daerah.

#### DINAMIKA PARNPOL DALAM PEMILU

Di Sumsel partai politik pemenang Pemilu pada tahun 1999 didominasi oleh PDIP, partai Golkar di posisi kedua, diikuti PPP, PAN, dan PBB. Sedangkan pada tahun 2004 terjadi pergeseran signifikan, di mana urutan pertama kembali diraih oleh partai Golkar diikuti PDIP di posisi kedua, Partai Demokrat, PAN, dan PKS. Perubahan konfigurasi lima besar partai politik ini tidak terlepas dari pengaruh dari beberapa faktor. Pertama, faktor perlawanan terhadap kekuasaan yaitu ada kecenderungan perilaku pemilih di Sumsel mengarah pada partai yang "beroposisi". Artinya partai yang berkuasa cenderung kurang diminati karena terlihat beberapa kekurangan pada

saat partai berkuasa memegang tampuk pemerintahan. Pada tahun 1999 jelas sekali kekecewaan rakyat terhadap kinerja politik partai Golkar yang masih dibawah bayang-bayang rejim orde baru, sehingga terjadi perlawanan rakyat untuk tidak memilih Golkar yang menyebabkan partai ini tergeser pada urutan kedua. Isu-isu tentang kemiskinan menjadi senjata ampuh untuk menyakinkan pemilih, terutama rakyat kelas menengah ke bawah yang mendominasi segmentasi pemilih di Sumsel. Kalangan inilah yang menentukan mengapa PDIP berhasil meraih simpati pemilih pada Pemilu 1999. Pada Pemilu 1999 terjadi sebuah jargon politik "Metal" yang berarti Merah Total" sebagai representasi dukungan terhadap Megawati Soekarnoputri sebagai simbol politik atau dengan kata lain "trademark"nya PDIP.

Faktor kedua adalah faktor ekonomi, di mana menjelang Pemilu 1999, kondisi ekonomi masih diselimuti krisis ekonomi politik yang membuat kesengsaraan masyarakat lapis bawah sangat dirasakannya. Merosotnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika, menjadi akar persoalan munculnya krisis ekonomi, dan rakyat menyalahkan orde baru sebagai biang kerok terjadinya krisis ini. Golkarpun terkena imbasnya dalam Pemilu 1999 yang tidak mampu meyakinkan pemilih untuk keluar dari krisis yang berkepanjangan. Sebagai konsekuensi politisnya suara Golkar disalip oleh PDIP sebagai bentuk penolakan publik terhadap partai orde baru akibat tumbanganya rejim Soeharto, di mana Soeharto sebagai ketua dewan Pembina Golkar. Apakah pada pemilu 2009 partai Golkar akan disalip oleh PDIP atau partai lain, mengingat fluktuasi politik sangat memungkinkan jika dikaji dari *trend* politik di Sumsel yang selalu dipengaruhi oleh *trend* politik nasional. Sebagai ukurannya dapat

dikaji dalam setiap pilkada di Sumsel yang merupakan representasi dukungan kepada partai politik, walaupun ada anggapan bahwa situasi politik dalam pilkada akan sangat berbeda dengan kondisi politik dalam pemilu legislatif, namun paling tidak peta politik dalam pilkada menjadi rambu-rambu yang akan menggiring perilaku politik publik dalam pemilu 2009 mendatang.

#### **DINAMIKA PARPOL DALAM PILKADA**

Pilkada di Sumsel sudah berlangsung dalam tiga gelombang pemilihan. Sepanjang tahun 2005 terjadi 5 pilkada Bupati yaitu kabupaten Musi Rawas, OKU Induk, OKU Timur, OKU Selatan, dan Ogan Ilir sebagai daerah yang pertama kali melaksanakan pesta demokrasi secara langsung untuk menentukan kepemimpinan di daerah kabupaten. Pada tahun 2007 diadakan pemilihan Bupati Musi Banyuasin. Selama tahun 2008 di Sumsel terjadi 8 kali Pilkada bupati/walikota dan 1 pemilihan Gubernur, yaitu pilkada kota Lubuk Linggau, Pagar Alam, Prabumulih, Palembang, dan kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Lintang Empat Lawang, Ogan Komering Ilir, dan Lahat. Satu pemilihan gubernur Sumatera Selatan. Dari penyelenggaraan pilkada tiga gelombang pilkada, masing-masing parpol telah mengusung dan mendukung calon bupati/walikota dan gubernur sebagai bentuk dukungan politis sebagai mana yang disyaratkan oleh undang undang.

Pilkada yang berlangsung sepanjang tahun 2005 masing-masing parpol telah memberikan dukungannya dan mengusung calon kepala daerah yang dijagokan. Di Musi Rawas terjadi pertarungan seimbang antara pasangan calon bupati/wakil bupati Ridwan Mukti/Ratnawati yang didukung oleh PDIP dengan pasangan Syarif Hidayat/Sumarno yang didukung oleh

partai Golkar. Menariknya, balon bupati Ridwan Mukti adalah tokoh partai Golkar Pusat (anggota DPR RI utusan partai Golkar) didukung oleh PDIP. Pada saat perhitungan suara sempat terjadi peristiwa pemblokiran kantor KPUD Musi Rawas oleh kelompok pendukung Syarif Hidayat, dan dibubarkan oleh kelompok pendukung Ridwan Mukti. Akhirnya pasangan Ridwan Mukti/Ratnawati memenangkan pertarungan dengan angka tipis yang kemudian dilantik menjadi Bupati Musi Rawas priode 2005-2010.

Di Kabupaten OKU Timur, pasangan calon Bupati Herman Deru yang berpasangan dengan Kholid Mawardi didukung oleh PPP berkoalisi dengan PBB. Pasangan ini berhasil memenangkan pertarungan setelah menyingkirkan empat calon lainnya yang diusung oleh partai besar termasuk partai Golkar dan PDIP. Walaupun bukan didukung oleh partai pemenang pemilu 2004, namun pasangan Herman Deru/Kholid Mawardi memenangkan pilkada dan dilantik menjadi bupati OKU Timur.

Pilkada di OKU Selatan menjadi unik karena dimenangkan oleh pasangan Muhtadin Sera'i/M. Wantjik Rasyid yang didukung oleh partai kecil PBB. Seperti yang terjadi di OKU Timur, Pilkada OKU Selatan kembali menggusur kekuatan partai besar yang mengusung calonnya (Partai Golkar dan PDIP) untuk menerima kekalahan dari pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang diusung oleh PBB. Pasangan Muhtadin Sera'i/M. Wantjik Rasyid berhasil memenangkan Pilkada OKU Selatan dan dilantik menjadi Bupati/Wakil Bupati OKU Selatan. Pilkada OKU induk menghasilkan pemenang pasangan Eddy Yusuf/Yulius Nawawi yang didukung oleh partai PAN dan PKB, sedangkan di Kabupaten Ogan Ilir pasangan Mawardi Yahya/Iskandar yang didukung oleh partai Golkar dan PAN berhasil menyingkirkan pasangan

lain yang didukung PDIP, PKS, dan PPP. Ini adalah satu-satunya jagoan dari partai Golkar yang memenangkan pertarungan Pilkada selama tahun 2005. PDIP memenangkan Ridwan Mukti, sedangkan partai lainnya (PAN, PPP, PBB) memenangkan pertarungan di OKU Timur, OKU Selatan, dan OKU Induk.

Pada tahun 2007 di Kabupaten Musi Banyuasin, Pilkada berjalan alot yang menampilkan pertarungan Partai Golkar dan PDIP. Partai Golkar mengusung pasangan Alex Noerdin/Pahri Azhari, didukung oleh PAN dan PKS bertarung dengan jago PDIP yang mengusung calon Usman Saleh. Dalam pertarungan Pilkada MUBA dimenangkan oleh pasangan Alex Noerdin/Pahri Azhari didukung oleh koalisi partai Golkar, PAN dan PKS yang kemudian dilantik menjadi Bupati MUBA priode 2007-2012. Kemenangan Alex Noerdin menjadi Bupati MUBA untuk kedua kalinya dijadikan modal politik untuk maju dalam pertarungan pilkada gubernur Sumsel menantang calon incumbent.

Sepanjang tahun 2008, di Sumsel terjadi pesta politik sebanyak sembilan kali. Dari hasil Pilkada di kabupaten/kota maupun provinsi, calon yang diusung partai Golkar menang di 5 kabupaten kota dan 1 provinsi. Ketujuh pasangan bupati/walikota yang diusung oleh partai Golkar yang menang dalam pertarungan pilkada adalah, pasangan Ridwan Effendy/Prana Sohe sebagai walikota/wakil walikota Lubuk Linggau, pasangan Jazuli Kuris/Farida sebagai walikota/wakil walikota Pagar Alam, pasangan Rahman Jalili/Ridho Yahya yang menang dalam pertarungan walikota/wakilwalikota Prabumulih, pasangan Budi Antoni/Sofyan Jamal memenangkan pertarungan pilkada Lintang Empat Lawang, dan pasangan Aswari/Duaji yang akhirnya memenangkan pilkada Lahat. Di

kabupaten OKI dan Banyuasin, kemenangan pasangan Amiruddin Inoed/Rahman Hasan sebagai bupati Banyuasin dan pasangan Iskah Mekki/Engga Dewata diusung oleh partai Golkar berkoalisi dengan PDIP dan partai lainnya. Begitu juga dengan pemilihan gubernur Sumsel, pasangan yang diusung oleh partai Golkar dan didukung oleh partai PBB, PAN, Demokrat, PNBK, dan PBR berhasil menumbangkan pasangan incumbent Syahrial Oesman/Helmi Yahya yang diusung PDIP, PPP, PKS, dan partai kecil lainnya.

PDIP berhasil memenangkan pertarungan di 2 pilkada yaitu dikabupaten Muara Enim melalui pasangan Kalamuddin/Heri Saisohar dan di kota Palembang melalui pasangan Eddy Santana Putra/Romi Hertan. Sedangkan di Kabupaten OKI dan Banyuasin, pasangan yang diusung berkoalisi dengan partai Golkar dan partai lainnya.

Jika dilihat secara keseluruhan maka pertarungan partai Golkar dan PDIP di kabupaten Kota dan Provinsi, 7 bupati dan walikota dan 1 gubernur Sumsel merupakan pasangan kepala daerah yang diusung partai Golkar, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Lahat, Lintang Empat Lawang, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Prabumulih dan Sumsel. PDIP memenangkan pertarungan di 3 Kabupaten Kota yaitu di Musi Rawas, Muara Enim dan Palembang. Selebihnya dimenangkan oleh pasangan yang diusung PPP dan PBB yaitu di Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan. Sedangkan PAN berhasil menang dalam pertarungan pilkada OKU Induk. Dua Kabupaten masing-masing Ogan Komering Ilir dan Banyuasin, partai Golkar dan PDIP bisa berkoalisi memenagkan pertarungan. Konfigurasi ini membuktikan bahwa dalam pilkada se Sumsel, dominasi partai Golkar dan PDIP sebagai dua partai besar masih mendominasi yang terlihat dari

pertarungan ketat dalam setiap pilkada, namun demikian secara umum partai Golkar masih unggul dalam memenangkan pertarungan pilkada.

### **PARTAI POLITIK DAN KEKUASAAN LOKAL**

Menurut kajian Lingkaran Survei Indonesia mencatat dari 158 pemilihan yang dianalisis, hanya 58 pemilihan yang dimenangkan oleh calon yang berasal dari partai pemenang pemilu (atau koalisi partai yang didukung oleh partai pemenang pemilu) (Lili Romli, 2008:352). Hasil ini mengisyaratkan hanya sepertiga dukungan yang diberikan partai pemenang pemilu berhasil memenangkan pilkada. Di Sumsel ternyata membuktikan bahwa partai pemenang pemilu (partai Golkar) memenangkan lebih dari separuh pilkada kabupaten kota dan gubernur. Hal ini karena sebagian besar pasangan yang memenangkan pilkada adalah pasangan *incumbent*, kecuali pada pilkada gubernur, di mana calon *incumbent* kalah tipis, ditumbangkan oleh penantang yang berasal dari partai Golkar.

Kemenangan pasangan yang didukung oleh parpol pemenang pemilu tidak hanya didukung oleh basis massa parpol, tetapi juga didukung oleh faktor figur kepala daerah yang bertarung dalam pilkada. Menurut Lili Romli (2008:253), salah satu faktor yang berperan dalam pilkada adalah kandidat itu sendiri, karena dalam pilkada langsung kandidat adalah bintang, figur sentral, dan magnet penarik massa. Bila kandidat yang dicalonkan tidak "laku jual" maka akan kalah besar sekali.

Selain itu, di Sumsel fenomena kemenangan calon *incumbent* sangat kuat, dari 10 pilkada bupati/walikota dan gubernur selama tahun 2008, 7

pasangan dimenangkan calon *incumbent*, sedangkan 2 pilkada tidak diikuti calon *incumbent*, dan hanya satu calon *incumbent* yang kalah yakni dalam pemilihan gubernur. Kemenangan pada *incumbent* dalam pandangan banyak kalangan tidak mengejutkan. Hal ini dikarena oleh faktor popularitas calon sebagai penguasa sebelumnya memberikan pengaruh signifikan terhadap kemenangannya. Selain itu dukungan mesin birokrasi juga disinyalir kuat memberikan pengaruh signifikan bagi calon *incumbent* memenangkan pertarungan. Hal ini berarti bahwa calon *incumbent* setidaknya sudah menang selangkah sebelum bertarung.

Kemenangan calon kepala daerah yang didukung oleh parpol akan memberikan pengaruh bagi parpol untuk bertarung pada pemilu legislatif, walaupun tidak begitu besar. Akan tetapi bukan jaminan bagi parpol yang mengusung banyak calon yang memenangkan pilkada akan menang dalam pemilu legislatif. Akan ada banyak faktor yang mempengaruhi pemilih, bagi parpol dalam memperebutkan kursi pada parlemen (DPRRI) dan parlemen lokal (DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota). Namun demikian dukungan kekuasaan lokal (kepala daerah) akan cukup berarti bagi parpol untuk bertarung dalam pemilu 2009 yang akan membuktikan bahwa figur kepala daerah merupakan representasi dukungan rakyat.

### **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dinamika parpol di Sumsel masih dipengaruhi oleh pertarungan dua partai besar yaitu partai Golkar dan PDIP yang dapat dilihat dari kemenangan partai tersebut pada pemilu legislatif dan pilkada. Dua

- partai ini akan saling memenangkan pertarungan jika dilihat dari kecenderungan politik pemilih di Sumsel.
2. Dalam pemilu legislatif faktor figur calon legislatif akan mempengaruhi kemenangan parpol, karena calon wakil rakyat akan bekerja mempengaruhi kinerja parpol dalam memperebutkan kursi di parlemen lokal.
  3. Dalam pilkada kepala daerah, dukungan parpol kepada pasangan calon kepala daerah akan dipengaruhi oleh figur pasangan calon yang akan bertarung dalam pilkada. Di Sumsel, pasangan calon incumbent mendominasi kemenangan kepala daerah yang didukung oleh partai Golkar dan PDIP.
  4. Pada pemilu 2009, parpol yang memenangkan pertarungan dalam pilkada kepala daerah belum tentu akan memenangkan pertarungan dalam pemilu legislatif karena dipengaruhi oleh figur calon legislatif dan faktor isu yang diangkat dalam kampanye pemilu mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri dan Yenrizal. 2003. *Sosiologi Politik*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Indra J. Piliang. 2008. *Partai Politik dan Demokrasi Deliberatif*, dalam Jurnal Analisis CSIS Vol 37, No. 2. Jakarta: CSIS.
- Lili Romli, 2008. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maruto, MD dan Anwari WMK (Editor). 2002. *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat*. Jakarta: LP3ES.

John Harriss dkk. 2005. *Politisasi Demokrasi, Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos.

Gregorius Sahdan dkk (Editor). 2008. *Politik Pilkada, Tantangan Merawat Demokrasi*. Yogyakarta: The Indonesian Power For Democracy.

Gregorius Sahdan dkk (Editor). 2008. *Rekayasa Politik dari Pemilu ke Pilkada*. Yogyakarta: The Indonesian Power For Democracy.

## KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH

Redaksi *ADMINISTRATIO* mengundang para penulis untuk berpartisipasi mengirimkan makalah ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal ini. Adapun ketentuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Artikel Ilmiah harus merupakan kajian ilmiah tentang disiplin administrasi publik dan masalah-masalah pembangunan.
2. Artikel Ilmiah dapat berupa ringkasan hasil penelitian maupun kajian teoritis (gagasan ilmiah) dan belum pernah diterbitkan dalam media publikasi lainnya.
3. Artikel ditulis dengan ukuran huruf font Trebuchet MS 11, 1 spasi, ukuran kertas A4 dan maksimal 20 halaman (termasuk daftar pustaka)
4. Artikel Ilmiah yang bersumber dari hasil penelitian terdiri dari:
  - a. Judul
  - b. Abstrak (dalam bahasa Inggris)
  - c. Pendahuluan
  - d. Masalah Penelitian
  - e. Metode Penelitian
  - f. Hasil dan Pembahasan
  - g. Kesimpulan dan Saran
  - h. Daftar Pustaka
5. Artikel ilmiah yang merupakan kajian teoritis (gagasan ilmiah) terdiri dari:
  - a. Judul
  - b. Abstrak (dalam bahasa Inggris)
  - c. Pendahuluan (uraian latar belakang dan masalah)
  - d. Isi (sesuai dengan kebutuhan penulis)
  - e. Penutup (kesimpulan)
  - f. Daftar Pustaka
6. Penulis harus menyertakan *softcopy* (dapat berupa CD atau Disket)
7. Tulisan/Artikel ilmiah yang diterima pengelola jurnal akan diseleksi oleh tim yang ditunjuk oleh pengelola.
8. Daftar pustaka ditulis dengan sistematika: nama penulis, tahun terbit, judul, penerbit dan kota penerbit. Contoh:

Syafi'ie, Kencana Inu, at all. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Bumi Aksara.  
Jakarta